

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Human Capital Theory*

Human capital secara bahasa terdiri atas dua kata dasar yaitu manusia dan kapital (modal). Kapital dimaknai sebagai faktor produksi untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan istilah kapital tersebut, manusia dalam *human capital* suatu bentuk aset sebagaimana mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki tugas atau tanggung jawab dalam segala aktifitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Menurut Jac Fitz-enz *Human Capital* sendiri menekankan pada pengertian bahwa manusia merupakan salah satu modal utama dalam perusahaan dengan nilai dan jumlah yang tidak terhingga, yang dapat dikelola dalam suatu proses, yang pada akhirnya menghasilkan *value creations* bagi para stakeholders seperti pemegang saham, konsumen, karyawan dan masyarakat.¹

Konsep Teori *Human Capital* yang merupakan suatu kemampuan yang ada dalam diri seseorang dengan segala kapasitas seperti pengetahuan, keterampilan yang dimiliki atau sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya sehingga menciptakan nilai tambah untuk mencapai tujuan.² Semakin berkembangnya teori ini, konsep *human capital* dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Konsep kedua menurut Alan dkk menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan sesuatu yang didapatkan melalui

¹ Jac Fitz-enz, *The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance* (amerika: amacom, 2009).

² Iwan Sukoco and Dea Prameswari, "Human Capital Approach To Increasing Productivity of Human Resources Management," *AdBispreneur* 2, no. 1 (2017): 94, <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v2i1.12921>.

akumulasi suatu proses tertentu. Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia.

Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Romer berpendapat *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi.³ Sedangkan Rosen berpendapat *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya.⁴ Frank & Bemanke berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia.

Menurut Schultz *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. *Human capital* merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 1776 di bidang ekonomi klasik. *Human capital* mampu dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktifitas semakin tinggi. Kedua, investasi yaitu cara utama dalam meningkatkan atau memperoleh *human capital*. Pendidikan dan pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga produktifitas juga akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi mementingkan kuantitas jumlah tenaga kerja.

Todaro menyatakan bahwa *human capital* dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Sementara itu, kesehatan merupakan bidang yang saling terkait dengan pendidikan. Pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktifitas. Sementara itu, pendidikan yang tinggi juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.⁵

Pengukuran indikator kesehatan dalam *human capital* dilakukan dengan menggunakan nilai angka harapan hidup (AHH).

³ Paul M. Romer, "Endogenous Technological Growth," *Journal Of Political Economy* 98, No. 5 (1990): 71-102.

⁴ Rosen H, S, *Public Finance* (New York: Mcgraw-Hill, 1999).

⁵ Todaro Michael P, *Economic Development, Seventh Edition* (New York: University Addison Mesley, 2000).

Menurut Mantra Nilai AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang maka semakin berkualitas indikator kesehatannya. Selain AHH, banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur indikator kesehatan seperti kematian bayi dan kematian ibu hamil. Hal ini bergantung dari tujuan penelitian yang diharapkan. Pengukuran indikator pendidikan dilakukan dengan menggabungkan dua komponen, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf ialah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Komponen melek huruf dirasa telalu sederhana untuk mengukur tingkat pendidikan karena pendidikan semakin mudah diakses oleh banyak orang. Kedua komponen tersebut ialah ukuran yang tepat dalam menentukan kualitas pendidikan seseorang. Rata-rata lama sekolah dapat secara jelas menggambarkan kualitas pendidikan seseorang, seperti lulusan SD dengan lulusan Doktor akan memiliki perbedaan kemampuan yang berpengaruh terhadap tingkat produktifitas.

2. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan konsep yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Upaya untuk mensejahterakan masyarakat di dalam pembangunan manusia mencakup tiga komponen dasar yaitu peluang hidup (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), hidup layak (pendapatan). Proses pembangunan sumber daya manusia adalah suatu proses yang berjangka panjang yang membutuhkan interaksi dari semua sektor yang akan terjadi dengan bertahap.

Pembangunan sumber daya manusia dalam *Arab Human Development Report* digunakan untuk mengembangkan masyarakat agar dapat membangun kemampuannya sendiri. Pembangunan manusia menegaskan bahwa manusia harus turut serta berpartisipasi dalam merangsang proses-proses yang dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Dasar pembuatan Indeks Pembangunan Manusia ini adalah

karena melihat betapa pentingnya memperhatikan kualitas dari sumber daya manusia.⁶

IPM disusun dari komponen pembangunan manusia yang dianggap menjadi dasar yaitu ketahanan hidup/usia, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pendidikan yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa dan angka rata-rata lama sekolah, kualitas standar hidup yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang domestik di masing - masing negara.

Menurut Christy dan Adi, Indeks Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang selanjutnya ditentukan oleh banyak faktor terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Infrastruktur dibangun oleh negara melalui belanja modal. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 belanja modal dapat berupa: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal Badan Layanan Umum (BLU).⁷

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. United Nations Development Program (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu IPM untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan, dan indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat.⁸

⁶ Adelfina And Jember, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013."

⁷ Ningrum, Khairunnisa, And Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam."

⁸ Novita, Yusuf, And Iyan, "Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau."

b. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manfaat indeks pembangunan manusia bisa dijelaskan ke dalam hal berikut:

- 1) IPM adalah indikator utama yang digunakan agar dapat menilai seberapa berhasilnya usaha pembangunan kualitas hidup seseorang.
- 2) Untuk negara ini sendiri, IPM adalah suatu data strategis sebab selain menjadi tolok ukur kinerja dari pemerintah, IPM pun dimanfaatkan sebagai salah satu alat penentu bagi Dana Alokasi Umum (DAU).
- 3) IPM mampu melakukan penentuan terhadap level atau peringkat pembangunan pada suatu area atau negara.⁹

c. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia ialah sebuah indeks komposit yang terhitung dari pendekatan tiga bagian, yaitu dimensi umur panjang serta hidup sehat atau dengan kata lain nilai keinginan untuk hidup ketika lahir, dimensi pengetahuan atau dengan kata lain angka melek huruf dewasa, serta dimensi kelayakan dalam hidup secara umum atau dengan kata lain PDB rata-rata setiap orang.

Perubahan yang dilakukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) terhadap penghitungan IPM dikarenakan metode yang digunakan sudah tidak akurat serta terdapat banyak indikator yang sudah tidak sesuai agar dapat dimanfaatkan kedalam proses hitung IPM. Tiga hal yang mengalami perubahan pada IPM yaitu perubahan pada variabel Angka Melek Huruf diubah menjadi Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Bruto (PDB) diubah menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) rata-rata setiap orang, serta teknik agregasi diganti dari rata-rata aritmatik ke rata-rata geometrik.¹⁰

Tiga komposisi indikator yang gunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia yakni :¹¹

⁹ Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia”, Bps, Diakses Pada 22 September, 2023, <https://www.bps.go.id/subject/26/Indeks-Pembangunan-Manusia.html>, N.D.

¹⁰ Ningrum, Khairunnisa, And Huda, “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam.”

¹¹ Nadia Ayu Ayubhakti, Istiqomah Istiqomah, And Suprpto Suprpto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012,” *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 18, No. 4 (2018): 456, <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2014.V18.I4.97>.

- 1) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- 2) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- 3) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Indeks Pembangunan Manusia dalam perspektif Ekonomi Syariah. Manusia pada esensinya yang terdiri atas unsur ruhaniah dan jasadiyah. Keseimbangan kehidupan manusia haruslah tetap terwujud ataupun terjadi. Olehnya manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya di alam materi ini tidak cenderung pada kebutuhan fisik jasad (materi) saja tapi kebutuhan ruhaniapun (imateri) juga harus terpenuhi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual menghendak pembangunan moral sehingga semua kebutuhan umat manusia dapat dipenuhi secara utuh terwujud suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang selaras dan adil. Hal ini tidak mungkin diwujudkan kecuali apabila tidak tersedia fasilitas-fasilitas untuk melatih mereka menjadi menjadi lebih produktif melalui pengembangan kemampuannya dan juga diberi kesempatan berwirausaha dan bekerja untuk mendapatkan gaji.

Pembangunan manusia dalam ekonomi islam tidak hanya bersifat materi, tapi spiritual dan moral juga penting. Sebab tujuan kesejahteraan selaras dengan maqashid syariah artinya kesejahteraan itu terletak pada perlindungan terhadap agama, keselamatan, nyawa manusia, akal, keturunan, dan harga benda. Menurut surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan

terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Ayat ini menjelaskan bahwa menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah SWT dan tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan aniaya dan saling bermusuhan, serta berbuat kerusakan dan dosa di muka bumi.

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan keimanan (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nashb) dan kekayaan (mal). Islam mengajarkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah baik secara ekonomi, agama, ilmu maupun pertahanan.

- 1) Memelihara agama (Hifzh al-Din) Manusia pada hakikatnya membutuhkan agama sebagai sumber nilai dalam berkehidupan. Olehnya agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama.
- 2) Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs), Jiwa merupakan esensi kemanusiaan. Sebab kondisi jiwa yang kurang sehat akan menjadikan hidup ataupun perilaku tidak stabil. Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat. Dengan terpeliharannya jiwa sehingga terhindar dari tindakan penganiayaan terhadap diri sendiri seperti pembunuhan, maupun tindakan melukai termasuk didalamnya mengkonsumsi makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (israf).
- 3) Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql) .akal menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi manusia. Sehingga syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah Swt. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu akal yang dimaksud dalam bentuk pengetahuan,
- 4) Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) Keturunan menjadi salah satu factor kunci keberlangsungan kehidupan. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna

akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, sebagai wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenteram dan damai.

- 5) Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) harta merupakan sesuatu hal yang paling dicari ataupun diusahakan oleh manusia. Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah Swt namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Dalam proses untuk mendapatkannya tidak dibenarkan dengan cara yang batil ataupun yang tidak dibenarkan secara syariat.

3. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Menurut Suyana Utama kemiskinan biasanya dikenali dari ketidakmampuan sebuah rumah tangga atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berbagai kaitan yang mencitrakan orang tersebut menjadi miskin. Kemiskinan memiliki wujud majemuk termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan yaitu: kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat pendapatan, serta diskriminasi. Kemiskinan juga dicirikan oleh tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang rendah.¹²

Menurut Amartya Sen dalam Suradi bahwa terdapat inti absolut dari kemiskinan. Kelaparan yang melanda mereka menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga dengan ketidakmampuan dalam kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam mendidik anak-anak (pendidikan) serta merawat kesehatan anak-anak.¹³

Sehubungan dengan penyebab kemiskinan agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah terutama pemerintah daerah harus meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus menjadi pusat perhatian untuk cepat ditanggulangi. Beberapa ahli berpendapat pendekatan yang dianggap cukup jitu dalam menangani kemiskinan adalah menciptakan aktivitas ekonomi di daerah

¹² Adelfina And Jember, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013."

¹³ Mirza, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009."

yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptakan pembangunan ekonomi.¹⁴

Hartono dan Aziz dalam Hudaya menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, beban keluarga.

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia menurut Syamrilaode antara lain:

- 1) Rendahnya produktivitas tenaga kerja
- 2) Tingkat upah rendah
- 3) Timpangnya distribusi pendapatan
- 4) Kurangnya kesempatan kerja
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya alam
- 6) Masih kurangnya penggunaan teknologi
- 7) Etos kerja dan motivasi kerja yang rendah
- 8) Kultur budaya
- 9) Pembangunan ekonomi/pertumbuhan ekonomi.

Semua faktor saling mempengaruhi dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang utama atau faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵

b. Jenis Kemiskinan

Kemelaratan bisa terbagi menjadi lima jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemelaratan absolute, terjadi ketika tingkat penghasilan seseorang tidak mampu untuk mencukupi keperluan dasar hidupnya.
- 2) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang ditimbulkan oleh variabel budaya, serta individu tersebut tidak ingin mengubah tingkat kehidupannya ke arah yang lebih baik lagi agar bisa hidup dengan layak.
- 3) Kemiskinan relative, terjadi ketika tingkat penghasilan seseorang berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya.
- 4) Kemiskinan sementara, terbentuk ketika siklus ekonomi mengalami perubahan dari wajar menjadi kekurangan serta

¹⁴ Anak Agung Eriek Estrada And I Wayan Wenagama, "Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan," *E-Jurnal Ep Unud* 9, No. 2 (2020): 237.

¹⁵ Cokorda I. D. P Yanthi And A A I N. , Marhaeni, "Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali," *Piramida* 11, No. 2 (2015): 70.

kemelaratan ini bersifat sewaktu-waktu, Kemelaratan kronis, terjadi ketika keadaan sosial budaya yang tidak lagi produktif, sumber daya yang terbatas, terpencil, keterisolasian, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan ketidakberdayaan dalam menghadapi ekonomi pasar.¹⁶

Menurut Suharto, kemiskinan dibagi menjadi 4 bagian :

- 1) Kemiskinan jenis sosial, yaitu kemelaratan yang dialami oleh anak-anak, perempuan, bias gender, diskriminasi, serta kelompok minoritas.
- 2) Timbulnya kemiskinan karena globalisasi, globalisasi menciptakan negara yang menang dan juga negara yang kalah, negara yang menang biasanya akan menjadi negara yang maju begitu pula sebaliknya.
- 3) Kemiskinan jenis konsekuensial, kemelaratan yang terjadi karena faktor luar dalam garis besarnya yakni bencana alam, kerusakan lingkungan, serta konflik.
- 4) Kemiskinan yang berhubungan dengan pembangunan, terjadi karena pembangunan yang masih rendah, misalnya kemiskinan dalam desa serta kemiskinan dalam kota.

c. Indikator dan Ukuran Kemiskinan

Berdasar pada pendekatan kebutuhan primer, terdapat 3 indeks kemiskinan yang dimanfaatkan, diantaranya :

- 1) HCI-P0 (Head Count Index) merupakan persentase masyarakat yang ada kurang dari GK (Garis Kemiskinan).
- 2) Poverty Gap Index-P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) adalah parameter umumnya disparitas pengeluaran tiap-tiap warga yang tidak berkecukupan pada garis kemelaratan. Dengan bertambah tingginya nilai indikator kedalaman kemiskinan sehingga amat sangat jauh lazimnya pengeluaran warga dari garis kemelaratan.
- 3) Poverty Severity Index-P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) didefinisikan sebagai sebuah gambaran terkait pembagian pengeluaran di antara warga yang tidak berkecukupan. Dengan bertambah tingginya nilai indikator keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi pula pincangnya sebuah pengeluaran di antara para warga yang tidak berkecukupan.¹⁷

¹⁶ Suharto Edi, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹⁷ Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan Dan Ketimpangan", *Bps, Diakses Pada 21 September, 2023*, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, N.D.

4. Tingkat Pengangguran

a. Pengertian tingkat pengangguran

Pengangguran menjadi masalah setiap negara, bahkan negara maju terlebih lagi di negara sedang berkembang seperti Negara Indonesia. Menurut Sri Budhi negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara sedang berkembang maupun negara maju senantiasa menghadapi masalah pengangguran, perbedaannya negara berkembang negaranya yang menganggur tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga, sedangkan negara maju mampu memberikan tunjangan. Berbagai cara mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh oleh pemerintah, namun masalah ini belum mampu untuk diselesaikan. Pengangguran sangat berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan dan politik karena itu sangat penting untuk diperhatikan mengenai masalah pengangguran.¹⁸

Definisi tingkat pengangguran adalah presentase seseorang yang digolongkan kedalam angkatan kerja dan mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu secara aktif, tetapi belum bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Dampak buruk pengangguran berdampak terhadap perekonomian, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak maksimalnya kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan pajak pemerintah menurun sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi. Pengangguran berdampak terhadap masyarakat seperti menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan. Pengangguran menyebabkan menurunkan keterampilan dan pengangguran menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Jika masyarakat tidak menganggur dan memiliki penghasilan, penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan mereka untuk hidup. Jika kebutuhan hidupnya telah terpenuhi, sehingga tidak akan miskin, dan diharapkan tingkat pengangguran menjadi rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan pun akan semakin rendah.¹⁹

¹⁸ Yanthi And , Marhaeni, "Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali."

¹⁹ Yanthi And , Marhaeni.

Dari pendapat Sadono, pengangguran adalah kondisi tidak bekerja yang dirasakan oleh tenaga kerja, yang sudah melakukan usaha dalam pencarian kerja, namun tidak mendapatkannya. Jumlah pengangguran akan meningkat sebagai akibat dari penambahan angkatan kerja yang tidak bisa dibarengi dengan peluang kerja yang dimungkinkan oleh kegiatan finansial baru. Semakin tinggi angka pengangguran akan memunculkan efek yang buruk untuk kesamarataan distribusi pendapatan, sehingga nantinya ada tidak sedikit kelompok tenaga kerja yang tidak memiliki penghasilan.

b. Jenis Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno, berikut beberapa jenis pengangguran berdasar pada pemicunya.²⁰

1) Pengangguran Konjungtur

Pengangguran konjungtur adalah seorang yang menganggur penyebabnya oleh kebanyakan yang menganggur secara alamiah serta berjalan sebagai penyebab dari dikurangnya permintaan agregat. Turunnya permintaan agregat menyebabkan perusahaan meminimalkan total keseluruhan pekerja (karena kondisi bangkrut), yang menjadikan munculnya pengangguran konjungtur.

2) Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi merupakan seorang yang menganggur penyebabnya oleh pemanfaatan mesin serta teknologi maju lainnya.

3) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena struktur dalam perekonomian mengalami perubahan.

4) Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah seorang yang menganggur penyebabnya oleh perlakuan seorang pekerja untuk pergi dari pekerjaannya serta mencari sebuah pekerjaan yang dinilai sesuai atau lebih baik dari harapannya.

Berdasar pada cirinya, beberapa jenis pengangguran bisa dikelompokkan ke dalam empat jenis, yakni :

1) Pengangguran Musiman

Kondisi pengangguran yang terjadi pada beberapa waktu tertentu pada 1 tahun. Pengangguran jenis ini umumnya terjadi di dunia pertanian. Petani tidak akan

²⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2010).

mendapat pekerjaan selama menanti musim tanam dan/atau ketika jeda di antara musim tanam dengan musim panen.

2) Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan seseorang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Terciptanya pengangguran ini diakibatkan oleh kemajuan tenaga kerja yang lebih tinggi daripada tersedianya kesempatan kerja. Selain itu, pengangguran ini terjadi ketika seseorang yang ingin dan mampu untuk bekerja namun tidak tersedia pekerjaan yang cocok.

3) Setengah Menganggur

Kondisi pengangguran ketika seseorang bekerja kurang dari jam kerja biasanya yaitu 35 jam dalam kurun waktu 1 minggu.

4) Pengangguran Terselubung

Kondisi dimana seseorang yang tidak bisa bekerja secara maksimal yang disebabkan oleh alasan tertentu (misalnya dikarenakan sakit).²¹

c. Faktor yang Menyebabkan Pengangguran

Berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya pengangguran yakni:

- 1) Tidak seimbangnya total keseluruhan dari tenaga kerja dengan total keseluruhan dari ketersediaan lapangan kerja.
- 2) Pada era industri 4.0, cukup banyak perusahaan yang lebih memilih mempekerjakan robot atau mesin di bandingkan dengan manusia, karena robot atau mesin dinilai lebih efisien.
- 3) Kurangnya kemampuan/keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia.
- 4) Rendahnya kualitas pendidikan.
- 5) Tingginya angka kemiskinan.
- 6) Terjadi pemberhentian secara masal (PHK).
- 7) Lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal.
- 8) Tidak mampu bersaing secara global.
- 9) Lapangan pekerjaan yang kurang merata dan susah didapat.
- 10) Ekspektasi dari calon pekerja yang terlalu tinggi.²²

²¹ Sayifullah Sayifullah And Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* 6, No. 2 (2016): 247, <https://doi.org/10.35448/Jequ.V6i2.4345>.

d. Indikator Tingkat pengangguran

Terdapat 3 kategori indicator pengangguran yakni Ekonomi, Pendidikan, Sosial Kependudukan :²³

1) Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi

Secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukan kecendrungan perubahan perekonomian dalam waktu tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian.

b) PDRB

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. Tujuan menghitung PDRB yaitu untuk perencanaan atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

c) Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam periode tertentu. Terjadi inflasi apabila kenaikan barang atau jasa itu meluas sehingga menyebabkan kenaikan barang pada barang lainnya

d) UMK/UMR (Upah Minimum Regional)

Upah minimum merupakan standar yang ditetapkan pemerintah agar pengusaha membayar upah pekerja dengan layak. Kenaikan upah minimum biasanya ditetapkan satu tahun sekali.

²² Fahri, Abd Jalil, And Sri Kasnelly, "Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19)," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2020): 51, [Http://Www.Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Almizan/Article/View/142](http://Www.Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Almizan/Article/View/142).

²³ Anung Faizal Hanani Wijaya, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Di Provinsi Aceh Dengan Regresi Nonparametrik Spline Truncated," *Repository.Its* 1 (2018): 11.

2) Pendidikan

a) Rata-rata lama sekolah

Jumlah tahun belajar penduduk umur kurang lebih 15 tahun yang telah diselesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

b) Angka partisipasi sekolah

Perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada beberapa jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase.

c) Angka melek huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tidak perlu mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

3) Sosial Kependudukan

a) Pertumbuhan Penduduk

Besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Perubahan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk.

b) TPAK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan Perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. TPAK dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk dalam usia kerja dan dapat pula dinyatakan untuk suatukelompok penduduk tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok wanita kelompok tenagaterdidik dan lain-lainnya

c) Penduduk Miskin

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang di dapatkan dari hasil survei (sampel).

d) Rasio Ketergantungan

Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif.

5. Pengeluaran Pemerintah

a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Menurut Usualiadanti Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Konsumsi pemerintah adalah pembelian barang dan jasa yang akan dikonsumsi seperti membayar gaji, membeli alat-alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan operasional pemerintah. Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah atas produk nasional karena pengeluaran tersebut untuk membeli barang dan jasa.²⁴

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sadono Sukirno dalam buku Marzuki Ilyas faktor yang bersifat ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor yang bersifat ekonomi, adalah yang berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh dapat berjalan pesat.
- 2) Faktor bersifat politik dan sosial, adalah faktor yang memakai anggaran pengeluaran yang besar. Seperti menjaga pertahanan dan keamanan negara, bantuan-bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lainnya.

c. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

²⁴ Bakar, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika."

- 1) Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan balas jasa masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan.
- 2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 3) Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang secara langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan nasional dalam kaitannya jasa-jasa tadi.
- 4) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.
- 5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masayang akan datang pasti akan lebih besar.²⁵

d. Indikator Pengeluaran Pemerintah

- 1) Pengeluaran konsumsi pemerintah dan investasi bruto merupakan ukuran pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa yang termasuk dalam PDB. Pengeluaran konsumsi mencakup pengeluaran pemerintah untuk tenaga kerja dan barang serta jasa, seperti bahan bakar untuk jet militer dan sewa gedung pemerintah serta struktur lainnya. Investasi bruto mencakup pengeluaran pemerintah untuk struktur, peralatan, dan perangkat lunak, seperti jalan raya baru, sekolah, dan komputer.
- 2) Total pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan pengeluaran yang termasuk dalam PDB. Pengeluaran saat ini mengukur seluruh pengeluaran pemerintah pada aktivitas periode berjalan, dan bukan hanya pengeluaran konsumsi

²⁵ Subandi, Ekonomi Pembangunan, Bandung : Alfabeta, 2011

pemerintah, namun juga pembayaran transfer saat ini, pembayaran bunga, dan subsidi (dan menghilangkan akrual upah dikurangi pencairan). Pembayaran seperti pembayaran transfer dan pembayaran bunga tidak termasuk dalam penghitungan PDB karena pembayaran tersebut tidak mewakili pembelian barang dan jasa, meskipun pendapatan dari transfer dan pembayaran bunga dapat mendanai pengeluaran konsumsi atau investasi di sektor perekonomian lainnya.

- 3) Investasi bruto dan pengeluaran jenis modal lainnya merupakan transaksi yang termasuk dalam pengeluaran saat ini, yang dapat berpengaruh pada masa depan aktivitas periode, seperti pembayaran transfer modal dan pembelian bersih aset yang tidak diproduksi (misalnya tanah). Total pengeluaran tidak termasuk konsumsi modal tetap (CFC), yang merupakan biaya nontunai.²⁶

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Warsito Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.²⁷

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

²⁶ Azwar Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia," *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 20, No. 2 (2016): 150, <https://doi.org/10.31685/Kek.V20i2.186>.

²⁷ Yanto And Fattah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Survei Pada Kabupaten / Kota Di Sulawesi Tengah)."

b. Indikator Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

- a) Pajak daerah yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
- d) Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

3) Hasil Pengelolaan kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatannya mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat,

Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan daerah. Jadi dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi

secara umum, yakni efisiensi. Dalam penjelasan umum UU No. 5/1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai “suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah

4) **Lain-lain PAD yang sah.**²⁸

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan Lain-lain yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat (Bencana Alam) dan Pendapatan Lainnya misalnya Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro, pendapatan denda pajak, denda retribusi, fasilitas umum maupun sosial, dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dijadikan sebagai rujukan, inspirasi maupun referensi pada penelitian ini dipaparkan dalam bentuk tabel serta diuraikan secara singkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ningrum , Khairunnisa dan Huda (2020)	Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah	Hasil penelitian menunjukan bahwa kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan	Variabel independen : Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Variabel	Menggunakan penambahan variabel yaitu pertumbuhan ekonomi. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah semua

²⁸ Putra And Ulupui, “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.”

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam.	terhadap IPM. ²⁹	dependen : Indeks Pembangunan Manusia.	provinsi yang ada di Indonesia.
2.	Pangestika dan Edy Widodo (2017)	Analisis Regresi panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota D.I.Yogyakarta.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. ³⁰	Variabel independen: kemiskinan Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Menggunakan penambahan variabel yaitu analisis regresi panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi IPM Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah kabupaten D.I.Yogyakarta.
3.	Furqoni, Junaidi dan Bhakti (2019)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka	Variabel independen: kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran	Menggunakan variabel tambahan yaitu pertumbuhan ekonomi Penelitian

²⁹ Ningrum, Khairunnisa, and Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam."

³⁰ Pangestika and Widodo, "Analisis Regresi Panel Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta."

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-provinsi di Sumatera.	berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. ³¹	an Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia.	dilakukan di Provinsi Sumatera.
4.	Dewi Azizah Meydiasari dan Ady Soejoto (2017)	Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia,	hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. ³²	Variabel independen: distribusi pendapatan, tingkat pengangguran dan pengeluaran pemerintah Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Menggunakan variabel tambahan yaitu distribusi pendapatan Penelitian dilakukan di Indonesia
4.	Septiana M. M. Sanggelo rang, Vekie A. Rumate, dan Hanly	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap	Hasil penelitian menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor	Variabel independen pengeluaran pemerintah Variabel dependen indeks pembanguna	Menggunakan variabel tambahan di sektor pendidikan dan kesehatan Tempat

³¹ Dzaki Furqoni Za And Adi Bhakti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan , Pengeluaran Pemerintah , Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Sumatera" 8, No. 3 (2019): 182.

³² Meydiasari and Soejoto, "Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia."

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	F.DJ. Siwu (2015)	Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara.	pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap ipm. meskipun berpengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap ipm hal ini membuktikan bahwa pengeluaran untuk sektor tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan	n manusia.	penelitian berada di Sulawesi utara.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			alokasinya. ³³		
5.	Nur Baeti (2013)	Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. ³⁴	Variabel dependen: Indeks pembangunan manusia.	Menggunakan tambahan variabel independen analisis pertumbuhan ekonomi. Populasi dan sampelnya berada di Jawa Tengah.
6.	Yanto, Ridwan dan Fattah (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Survei	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia.	Menggunakan penambahan variabel yaitu Belanja Modal Populasi dan sampelnya yaitu di Kabupaten/Provinsi Sulawesi

³³ Septiana M M Sanggelorang, Vekie A Rumate, And F D J Siwu, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, No. 02 (2015): 3.

³⁴ Baeti et al., "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011."

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Pada Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Tengah).	indeks pembangunan manusia. ³⁵		Tengah
7.	Edy Sahlan, Yusuf dan Dodo Susanto (2022)	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Indeks pembangunan manusia (IPM)	penelitian yang dilakukan Edy, Yusuf dan Dodo menyatakan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. ³⁶	Variabel independen : Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen : Indeks Pembangunan Manusia.	Populasi Dan Sampel Di NTB

C. Kerangka Berfikir

Menurut teori Sugiyono, kerangka berpikir ialah suatu model konseptual yang terkait bagaimana teori berhubungan dengan banyaknya faktor yang sudah diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang utama.³⁷ Kerangka berpikir harus bisa mendeskripsikan secara komprehensif beberapa variabel apa saja yang diteliti dan bagaimana kaitan di antara variabel-variabel tersebut. Kerangka berpikir dimanfaatkan sebagai acuan supaya penelitian berjalan tidak melenceng dari tujuan penelitian. Berdasar pada landasan teori serta penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di atas,

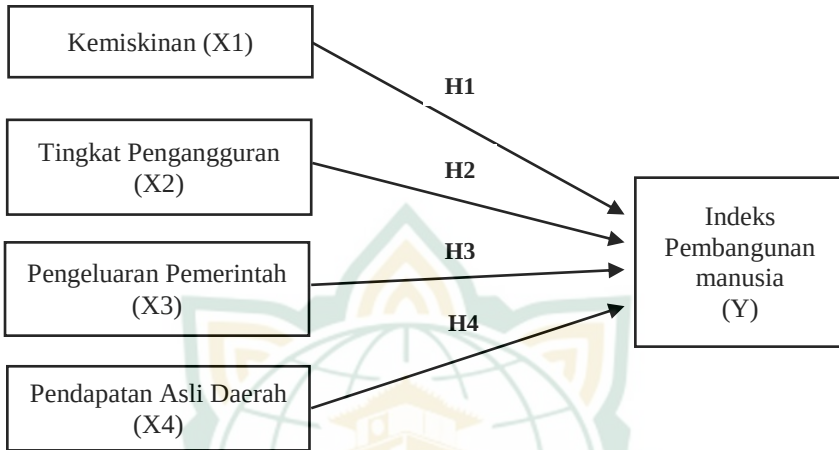
³⁵ Yanto And Fattah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Survei Pada Kabupaten / Kota Di Sulawesi Tengah)."

³⁶ Sahlan, Yusuf, and Susanto, "Pengaruh Pendataan Asli Daerah (Pad) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)."

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cv, 2017).

maka penelitian ini dapat diilustrasikan ke dalam kerangka berpikir sebagaimana di bawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil dari proses berpikir dalam kerangka berpikir konseptual. Hipotesis berfungsi sebagai acuan supaya penelitian bisa terlaksana sesuai dengan keinginan. Hipotesis menyatakan hubungan antara banyaknya variabel yang nantinya diuji secara empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat mendukung atau menolak hipotesis.³⁸ Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis di dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Chamber dalam Prasetyo menyatakan kemiskinan ialah suatu keadaan seseorang mengalami kesulitan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Arti luasnya, kemiskinan ialah suatu *integrate concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu : Kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.³⁹

³⁸ Nurlina, T Muhyidin, And Dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial: Teori, Konsep, Dan Rencana Proposal* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

³⁹ Ningrum, Khairunnisa, And Huda, “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam.”

Teori *Human Capital* menjelaskan manusia juga memiliki tugas atau tanggung jawab dalam segala aktifitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Hal ini berkaitan dengan kemiskinan dimana tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang harus diatasi di daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptakan pembangunan ekonomi sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan di suatu daerah. Pemerintah harus melihat ukuran kemiskinan melalui presentase, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan itu sendiri.

Kemiskinan di kategorikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer hidupnya yakni seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan akan menghalangi seseorang atau komunitas orang untuk mendapatkan makanan, apalagi makanan bersih, bergizi, juga masalah pendidikan yang bagus dan lingkungan yang bersih. Inti absolut dari kemiskinan yaitu kelaparan yang melanda mereka menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga dengan ketidakmampuan dalam kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam mendidik anak-anak (pendidikan) serta merawat kesehatan anak-anak. Oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai IPM.

Sehubungan dengan penyebab kemiskinan agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah terutama pemerintah daerah harus meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus menjadi pusat perhatian untuk cepat ditanggulangi. Beberapa ahli berpendapat pendekatan yang dianggap cukup jitu dalam menangani kemiskinan adalah menciptakan aktivitas ekonomi di daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptakan pembangunan ekonomi.⁴⁰

Dari data tersebut didukung juga oleh penelitian dari Pangestika dan Widodo yang meneliti hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh positif terhadap IPM.⁴¹

⁴⁰ Estrada And Wenagama, "Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan," 2020.

⁴¹ Ningrum, Khairunnisa, And Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IpM) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam."

Penelitian yang dilakukan oleh Hardanti melakukan penelitian tentang indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan kemiskinan, serta terdapat hubungan yang signifikan antara daya beli dan kemiskinan, apabila kemiskinan dihitung dari presentase penduduk miskin Provinsi terhadap total penduduk tiap provinsi di Indonesia.⁴²

Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

H₁ : Kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori *Human capital* dapat dicapai atau diperoleh salah satunya investasi, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan human capital. Pendidikan dan pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Hal ini berkaitan dengan pengangguran dimana salah satu penyebab tingginya angka pengangguran yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan. Sehingga ketika *human capital* tercapai melalui investasi berupa pendidikan dan pelatihan maka produktifitas semakin tinggi dan angka pengangguran akan semakin rendah.

Menurut Sri Budhi negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara sedang berkembang maupun negara maju senantiasa menghadapi masalah pengangguran, perbedaannya negara berkembang negaranya yang menganggur tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga, sedangkan negara maju mampu memberikan tunjangan. Berbagai cara mengatasi permasalahan yang ditempuh oleh pemerintah, namun masalah ini belum mampu untuk diselesaikan. Pengangguran sangat berpotensi menyebabkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan dan politik karena itu sangat penting untuk diperhatikan mengenai masalah pengangguran.⁴³

⁴² Adelfina And Jember, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013."

⁴³ Yanthi And , Marhaeni, "Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali."

Menurut Sukirno efek buruk dari pengangguran yakni berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh seseorang. Semakin kesejahteraan menurun karena menganggur tentunya akan bertambahnya peluang mereka terhimpit dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.⁴⁴

Penelitian oleh Furqoni, Junaidi dan Bhakti menyatakan Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.⁴⁵

Penelitian oleh Meydiasari dan Baeti juga menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan jumlah pengangguran yang tinggi dapat mengurangi kemakmuran hidup masyarakat dengan berkurangnya pendapatan masyarakat menjadi faktor dalam peningkatan IPM.⁴⁶

Selain itu menurut uraian tersebut bahwa pengangguran harus ditanggulangi karena menyebabkan efek buruk bagi kesejahteraan dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Pengangguran berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastuktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa bantuan

⁴⁴ Sayifullah And Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten."

⁴⁵ Za And Bhakti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan , Pengeluaran Pemerintah , Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IpM) Provinsi-Provinsi Di Sumatera."

⁴⁶ Ningrum, Khairunnisa, And Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IpM) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam."

untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah atas produk nasional karena pengeluaran tersebut untuk membeli barang dan jasa.⁴⁷

Berdasarkan teori *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya. Perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia. Sehubungan dengan pengeluaran pemerintah teori *human capital* bentuk investasi maupun pengeluaran untuk menyediakan fasilitas demi pembangunan infrastruktur yang dibuat untuk kepentingan masyarakat seperti jalan, sekolah, rumah sakit, bantuan atau subsidi, beasiswa, irigasi dan bentuk fasilitas lainnya.

Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap IPM melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum atau program-program langsung yang dapat merangsang produktivitas yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah.

Lubis berpendapat bahwa pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui konsumsi nutrisi yang baik, partisipasi pendidikan, dan kemudahan akses terhadap kesehatan sehingga setiap individu mempunyai ketahanan fisik, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sebagai modal dasar manusia (*human capital*).

Menurut penelitian tri dan Maryani menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap terhadap IPM hal ini membuktikan bahwa pengeluaran untuk sektor tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.⁴⁸

Didukung oleh penelitian Baeti juga membuktikan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Di didukung juga oleh penelitian Pratowo yang dapat membuktikan Belanja Daerah secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa

⁴⁷ Bakar, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika."

⁴⁸ Sanggelorang, Rumat, And Siwu, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara."

Tengah. Dengan demikian pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.⁴⁹

Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat demi kepentingan masyarakat. Maka hipotesis dari uraian penelitian tersebut yaitu:

H₃: Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori *Human Capital* yaitu salah satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. Teori tersebut menentukan bahwa manusia meningkatkan produktifitas ekonomi terwujud dalam bentuk-bentuk investasi seperti pelayanan publik. Keterkaitan Pendapatan asli daerah pada pembiayaan daerah yaitu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang dapat diukur dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD. Hal ini bertambah semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dalam hal ini *Human Capital* keterkaitan dengan PAD akan mempengaruhi pembangunan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Warsito berpendapat mengenai Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sebagai wujud upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik.⁵⁰

⁴⁹ Si'lang, Hasid, And Priyagus, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia."

⁵⁰ Yanto And Fattah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Survei Pada Kabupaten / Kota Di Sulawesi Tengah)."

Di dukung oleh penelitian Setyowati dan Suparwati yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.⁵¹

Penelitian terdahulu oleh Darwanto, Yustikasari dan Tausikal menyatakan bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.⁵²

Uraian tersebut menunjukkan bahwa PAD akan mempengaruhi pembangunan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan publik. Sehingga hal ini akan meningkatkan alokasi belanja modal dan mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Maka dari hipotesis penelitian tersebut adalah:

H₄: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.



⁵¹ Yanto And Fattah.

⁵² Pratama And Kartika, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Silpa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Melalui Belanja Modal Di Provinsi Bali.”